

PENGARUH EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI DAN KOMPETENSI PEGAWAYI TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Galih Febriatmoko

ABSTRACT

This study analyzes the influence of the effectiveness of the implementation of the Agency-Level Financial Application System (SAKTI) (X1) and employee competence (X2) on the performance of State Budget (APBN) financial management (Y) at the Directorate General of Politics and General Government, Ministry of Home Affairs. The study used a quantitative explanatory survey design. The population consisted of 42 SAKTI officials/users; 40 returned questionnaires were complete and used in the analysis. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed through validity and reliability tests, prerequisite and classical assumption tests, simple and multiple regression, correlation, significance tests, determination coefficients, and partial correlation. The results show that the effectiveness of SAKTI implementation has a positive and significant effect on APBN financial management performance, with $r = 0.707$ and a contribution of 49.9%. Employee competence also has a positive and significant effect, with $r = 0.661$ and a contribution of 43.7%. Simultaneously, both variables have a strong and significant relationship with financial management performance ($R = 0.752$) and explain 56.5% of its variation, while 43.5% is explained by other factors. These findings emphasize that digital financial systems and competent operators must be strengthened together to improve accountable and effective public financial management.

Keywords: SAKTI Implementation Effectiveness, Employee Competence, APBN Financial Management Performance

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh Efektivitas Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) (X1) dan Kompetensi Pegawai (X2) terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Y) pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Penelitian menggunakan desain kuantitatif eksplanatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian berjumlah 42 pejabat/pengguna SAKTI; sebanyak 40 kuesioner kembali secara lengkap dan digunakan dalam analisis. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas, uji persyaratan dan asumsi klasik, regresi sederhana dan berganda, korelasi, uji signifikansi, koefisien determinasi, serta korelasi parsial. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas Pelaksanaan SAKTI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN dengan $r = 0,707$ dan kontribusi 49,9%. Kompetensi Pegawai juga berpengaruh positif dan signifikan dengan $r = 0,661$ dan kontribusi 43,7%. Secara simultan kedua variabel memiliki hubungan kuat dan signifikan ($R = 0,752$) serta menjelaskan 56,5% variasi kinerja pengelolaan keuangan, sedangkan 43,5% dipengaruhi faktor lain. Temuan menegaskan bahwa penguatan sistem keuangan digital harus berjalan bersama peningkatan kompetensi pegawai untuk memperbaiki akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan APBN.

Kata Kunci: Efektivitas Pelaksanaan SAKTI, Kompetensi Pegawai, Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam administrasi publik, pengelolaan APBN bukan hanya berkaitan dengan penyerapan anggaran, tetapi juga dengan kemampuan instansi mempertanggungjawabkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kepada publik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menempatkan tertib administrasi, kepatuhan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prinsip utama pengelolaan keuangan pemerintah.

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah melakukan transformasi pengelolaan keuangan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI merupakan sistem terintegrasi yang digunakan satuan kerja kementerian/lembaga untuk mendukung proses penganggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, aset, dan pelaporan. Penerapan SAKTI menjadi bagian penting dari digitalisasi administrasi keuangan pemerintah dan memperoleh landasan operasional antara lain melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri merupakan satuan kerja yang mengelola APBN untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang politik dalam negeri dan pemerintahan umum. Sebagai pengguna SAKTI, Ditjen Polpum dituntut menghasilkan pengelolaan keuangan yang tepat waktu, akurat, tertib, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Karena itu, efektivitas penggunaan sistem menjadi faktor yang penting bagi kualitas pengelolaan keuangan.

Meskipun SAKTI telah diterapkan, tesis mencatat sejumlah tantangan pada praktik penggunaannya. Permasalahan yang muncul meliputi lambatnya akses pada beberapa modul, gangguan teknis seperti server down atau error, kestabilan jaringan, kebutuhan pemeliharaan aplikasi, serta belum meratanya sarana pendukung. Pada sisi pengguna, pemahaman pegawai terhadap modul SAKTI, literasi teknologi dan keuangan, pelatihan teknis yang belum berkelanjutan, variasi latar belakang pendidikan dan pengalaman, serta beban kerja administratif juga memengaruhi optimalisasi sistem.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi keuangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas aplikasi. Sistem yang terintegrasi memerlukan pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, pengalaman, dan kemampuan beradaptasi agar fungsi-fungsi sistem dapat digunakan secara benar. Hutapea dan Toha (2008) menjelaskan kompetensi sebagai kemampuan yang diperlukan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan, sedangkan Wibowo (2007) menekankan kompetensi sebagai kemampuan yang dilandasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.

Kerangka penelitian menempatkan efektivitas pelaksanaan SAKTI dan kompetensi pegawai sebagai dua faktor yang diduga memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan APBN. Efektivitas merepresentasikan sejauh mana sistem mampu mencapai tujuan, memenuhi ketepatan sasaran dan waktu, serta menghasilkan perubahan nyata. Kompetensi merepresentasikan karakteristik individu yang mendukung keberhasilan pekerjaan. Kinerja

pengelolaan keuangan merupakan hasil sinergi antara sistem, prosedur, dan aparatur yang menjalankannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian bertujuan menganalisis pengaruh Efektivitas Pelaksanaan SAKTI terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN, menganalisis pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN, serta menguji pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan pada Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Efektivitas Pelaksanaan SAKTI

Efektivitas secara umum menggambarkan tingkat keberhasilan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedarmayanti (2009) memandang efektivitas sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target dapat dicapai. Steers (1985) menempatkan efektivitas organisasi pada keterkaitan antara tujuan, kemampuan adaptasi, dan pencapaian hasil. Dalam konteks program publik, efektivitas menuntut adanya hubungan yang jelas antara tujuan, pelaksanaan, dan hasil yang dirasakan.

Untuk menilai efektivitas program, tesis mensintesis lima indikator, yaitu pemahaman program, ketepatan waktu, ketepatan sasaran, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Pemahaman program berkaitan dengan kemampuan pengguna memahami prosedur dan fungsi SAKTI; ketepatan waktu berkaitan dengan kemampuan sistem membantu penyelesaian proses keuangan sesuai jadwal; ketepatan sasaran menunjukkan kesesuaian pemanfaatan sistem dengan kebutuhan pengelolaan keuangan; tercapainya tujuan menunjukkan manfaat sistem bagi administrasi keuangan; sedangkan perubahan nyata melihat dampak sistem terhadap proses kerja.

Dalam penelitian ini, Efektivitas Pelaksanaan SAKTI dimaknai sebagai kemampuan penerapan sistem untuk mendukung pengelolaan keuangan secara lebih terintegrasi, akurat, cepat, dan sesuai ketentuan. Sistem yang efektif diharapkan mengurangi pekerjaan berulang, meningkatkan konsistensi data, membantu kepatuhan pada prosedur, dan mendukung akuntabilitas pengelolaan APBN.

2. Kompetensi Pegawai

Kompetensi merupakan kemampuan yang memungkinkan seseorang melaksanakan pekerjaan secara efektif. Hutapea dan Toha (2008) menjelaskan bahwa kompetensi mencakup apa yang harus diketahui atau dilakukan seseorang agar mampu menjalankan pekerjaan dengan baik, baik dalam aspek teknis maupun perilaku. Wibowo (2007) menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan melaksanakan pekerjaan yang dilandasi keterampilan dan pengetahuan serta didukung sikap kerja yang dituntut pekerjaan.

Kompetensi dalam tesis diukur melalui lima karakteristik yang merujuk pada Spencer dan Spencer sebagaimana dikutip Wibowo (2007), yaitu motive, traits, self-concept, knowledge, dan skill. Motif berkaitan dengan dorongan internal untuk bertindak; traits merupakan karakteristik yang relatif konsisten; self-concept mencakup nilai dan gambaran diri; knowledge merupakan informasi yang dimiliki dalam bidang pekerjaan; dan skill merupakan kemampuan melaksanakan tugas tertentu.

Pada pengelolaan keuangan berbasis SAKTI, kompetensi pegawai mencakup pemahaman terhadap regulasi keuangan, kemampuan mengoperasikan modul aplikasi, ketelitian, kemampuan menyelesaikan masalah, serta sikap bertanggung jawab. Kompetensi yang memadai memungkinkan pegawai memanfaatkan sistem secara optimal dan

menghasilkan proses serta keluaran pengelolaan keuangan yang lebih berkualitas.

3. Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN

Kinerja menggambarkan hasil pelaksanaan tugas dalam periode tertentu dibandingkan dengan sasaran atau standar yang telah ditetapkan. Afandi (2018) menempatkan kuantitas, kualitas, efisiensi, disiplin, inisiatif, dan ketelitian sebagai bagian dari indikator kinerja. Wibowo (2007) juga menekankan tujuan, standar, umpan balik, alat atau sarana, kompetensi, motif, dan peluang sebagai unsur yang membentuk kinerja.

Dalam konteks penelitian, Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN dimaknai sebagai tingkat keberhasilan aparatur dalam melaksanakan proses keuangan negara sesuai kewenangan dan tanggung jawab. Kinerja tidak semata-mata dilihat dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari kualitas hasil kerja, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap ketentuan, efisiensi proses, ketelitian pencatatan, serta kemampuan menghasilkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan antara ketiga variabel dibangun atas asumsi bahwa sistem dan manusia saling melengkapi. Efektivitas SAKTI dapat menyediakan sarana kerja yang terintegrasi, sedangkan kompetensi pegawai menentukan kualitas penggunaan sarana tersebut. Dengan demikian, kinerja pengelolaan keuangan APBN diperkirakan meningkat ketika penerapan SAKTI berjalan efektif dan pegawai memiliki kompetensi yang memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tingkat eksplanasi asosiatif dan metode survei. Variabel

bebas terdiri dari Efektivitas Pelaksanaan SAKTI (X1) dan Kompetensi Pegawai (X2), sedangkan variabel terikat adalah Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN (Y).

Populasi penelitian adalah 42 pejabat/pengguna SAKTI pada satuan kerja Ditjen Polpum Tahun Anggaran 2025. Teknik sampling yang direncanakan adalah sampling jenuh atau sensus karena seluruh anggota populasi dijadikan sasaran. Dari 42 kuesioner yang disebar, 40 kuesioner kembali dalam keadaan lengkap dan digunakan sebagai data penelitian.

Instrumen penelitian menggunakan kuesioner skala Likert. Efektivitas Pelaksanaan SAKTI diukur melalui 19 butir, Kompetensi Pegawai melalui 18 butir, dan Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN melalui 20 butir. Seluruh butir yang digunakan dinyatakan valid. Koefisien reliabilitas masing-masing variabel adalah 0,951 untuk Efektivitas Pelaksanaan SAKTI, 0,893 untuk Kompetensi Pegawai, dan 0,901 untuk Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN, seluruhnya berada di atas kriteria 0,70.

Analisis data dilakukan menggunakan SPSS. Tahapan analisis meliputi uji normalitas dan homogenitas, uji asumsi klasik (autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas), regresi linear sederhana, regresi linear berganda, korelasi, uji t dan uji F, koefisien determinasi, serta korelasi parsial. Model dinyatakan signifikan pada tingkat signifikansi di bawah 0,05.

HASIL PENELITIAN

1. Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan SAKTI terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN

Hasil regresi sederhana menunjukkan persamaan $Y = 39,893 + 0,533X1$. Persamaan ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Efektivitas Pelaksanaan SAKTI diikuti kenaikan

Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN sebesar 0,533 satuan pada konstanta 39,893. Uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung 37,915 lebih besar daripada Ftabel 4,0982 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga persamaan regresi dinyatakan signifikan.

Uji linearitas menghasilkan Fhitung 1,631 lebih kecil daripada Ftabel 2,1511 dan signifikansi $0,145 > 0,05$, sehingga hubungan dinyatakan linear. Koefisien korelasi antara Efektivitas Pelaksanaan SAKTI dan Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN adalah 0,707 yang menunjukkan hubungan positif dengan tingkat hubungan kuat. Uji t menghasilkan thitung 6,158 lebih besar daripada ttabel 2,4286 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$.

Koefisien determinasi sebesar 0,499 menunjukkan bahwa 49,9% variasi Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN dapat dijelaskan oleh Efektivitas Pelaksanaan SAKTI, sedangkan 50,1% sisanya dipengaruhi faktor lain. Hasil ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pemanfaatan SAKTI memiliki peran substantif dalam kualitas pengelolaan keuangan di Ditjen Polpum.

Temuan tersebut sejalan dengan kerangka efektivitas yang menempatkan pencapaian tujuan sebagai ukuran utama keberhasilan program. Ketika pegawai memahami fungsi sistem, proses dapat dilakukan tepat waktu dan sesuai sasaran, serta sistem memberikan perubahan nyata pada integrasi dan akurasi data, maka kualitas pengelolaan keuangan meningkat. Dengan demikian, efektivitas penerapan SAKTI bukan hanya persoalan ketersediaan aplikasi, tetapi juga kualitas pelaksanaan sistem dalam proses kerja.

2. Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN

Hasil regresi sederhana Kompetensi Pegawai terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN menghasilkan

persamaan $Y = 32,079 + 0,660X_2$. Artinya, setiap kenaikan satu satuan Kompetensi Pegawai diikuti peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN sebesar 0,660 satuan pada konstanta 32,079. Uji keberartian menghasilkan Fhitung 29,531 lebih besar daripada Ftabel 4,0982 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$.

Uji linearitas menghasilkan Fhitung 0,791 lebih kecil daripada Ftabel 2,1389 dan signifikansi $0,685 > 0,05$, sehingga persamaan regresi dinyatakan linear. Koefisien korelasi sebesar 0,661 menunjukkan hubungan positif dan kuat. Uji signifikansi menghasilkan thitung 5,434 lebih besar daripada ttabel 2,4286 dengan signifikansi $0,000 < 0,05$.

Koefisien determinasi sebesar 0,437 menunjukkan bahwa Kompetensi Pegawai menjelaskan 43,7% variasi Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN, sedangkan 56,3% lainnya ditentukan oleh faktor di luar variabel penelitian. Besarnya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pengguna sistem tetap menjadi determinan penting meskipun organisasi telah menggunakan aplikasi keuangan yang terintegrasi.

Secara substantif, kompetensi memengaruhi kualitas keputusan dan tindakan pegawai dalam menggunakan SAKTI. Pengetahuan terhadap regulasi, keterampilan mengoperasikan modul, ketelitian, sikap kerja, serta kemampuan memecahkan masalah akan mengurangi kesalahan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Karena itu, peningkatan kompetensi tidak dapat dipisahkan dari agenda transformasi digital pengelolaan keuangan.

3. Pengaruh Efektivitas Pelaksanaan SAKTI dan Kompetensi Pegawai secara Simultan

Analisis regresi berganda menghasilkan persamaan $Y = 27,330 + 0,361X_1 + 0,343X_2$. Persamaan ini menunjukkan bahwa peningkatan Efektivitas

Pelaksanaan SAKTI dan Kompetensi Pegawai secara bersama-sama diikuti peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN. Uji F menghasilkan Fhitung 24,069 lebih besar daripada Ftabel 3,2519 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga model regresi berganda dinyatakan signifikan.

Koefisien korelasi berganda sebesar 0,752 menunjukkan hubungan positif dan kuat antara kedua variabel bebas dengan Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN. Koefisien determinasi sebesar 0,565 berarti Efektivitas Pelaksanaan SAKTI dan Kompetensi Pegawai secara bersama-sama menjelaskan 56,5% variasi kinerja, sedangkan 43,5% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diperhitungkan dalam penelitian.

Hasil simultan memperkuat argumentasi bahwa sistem dan aparatur merupakan dua komponen yang saling melengkapi. Sistem yang efektif dapat memperbaiki alur proses, integrasi data, ketepatan waktu, dan akurasi informasi; namun manfaat tersebut bergantung pada kompetensi pengguna. Sebaliknya, pegawai yang kompeten akan menghadapi hambatan apabila sistem tidak andal atau tidak sesuai dengan kebutuhan proses kerja.

Dibandingkan pengaruh parsial, Efektivitas Pelaksanaan SAKTI memiliki kontribusi 49,9%, lebih tinggi daripada Kompetensi Pegawai sebesar 43,7%. Akan tetapi, kontribusi simultan sebesar 56,5% menunjukkan bahwa penguatan keduanya secara bersama lebih relevan dibandingkan intervensi yang hanya berfokus pada salah satu faktor. Korelasi parsial dalam tesis juga menunjukkan penurunan kekuatan hubungan ketika salah satu variabel dikontrol, yang menegaskan adanya keterkaitan di antara kedua faktor.

Implikasi praktis temuan ini adalah perlunya strategi ganda. Pengelola sistem perlu menjaga keandalan, kemudahan

penggunaan, kecepatan akses, pemeliharaan, dan keseragaman prosedur SAKTI. Pada saat yang sama, organisasi perlu menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang terencana, berkelanjutan, dan relevan dengan peran pengelola keuangan. Kombinasi tersebut diharapkan mendorong pengelolaan APBN yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menyimpulkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan SAKTI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN pada Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri. Hubungan kedua variabel tergolong kuat dengan koefisien korelasi 0,707 dan kontribusi 49,9%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas sistem diikuti peningkatan kualitas kinerja pengelolaan keuangan.

Kompetensi Pegawai juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN dengan koefisien korelasi 0,661 dan kontribusi 43,7%. Kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, karakteristik pribadi, dan sikap kerja menjadi faktor penting dalam memastikan penggunaan SAKTI dapat menghasilkan proses pengelolaan keuangan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara simultan, Efektivitas Pelaksanaan SAKTI dan Kompetensi Pegawai berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan APBN dengan koefisien korelasi berganda 0,752 dan koefisien determinasi 56,5%. Dengan demikian, peningkatan kinerja pengelolaan keuangan lebih efektif dilakukan melalui penguatan sistem dan kualitas sumber daya manusia secara bersamaan.

Berdasarkan temuan tersebut, pengelola sistem disarankan meningkatkan keandalan dan kemudahan penggunaan SAKTI, melakukan pemeliharaan dan

pembaruan secara berkala, serta memperjelas standar operasional prosedur. Peningkatan kompetensi pegawai perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan, penguatan pemahaman regulasi, pembinaan teknis, dan pendampingan penggunaan aplikasi. Pimpinan instansi juga perlu memastikan tersedianya sarana prasarana, dukungan kebijakan, serta evaluasi berkala agar pemanfaatan SAKTI dan kompetensi pegawai dapat berkembang secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, I. Z. (2020). *Optimalisasi Kinerja Karyawan Menggunakan Pendekatan Knowledge Management & Motivasi Kerja*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.
- Afandi, A. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2021). *Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)*.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2025). *Jumlah maintenance aplikasi SAKTI tahun 2022-2025*. Data portal HAI DJPb.
- Hasibuan, M. S. P. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hutapea, P., & Toha, N. (2008). *Kompetensi Plus: Teori, Desain, Kasus, dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. Jakarta: Gramedia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Uji Coba Aplikasi SAKTI*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 tentang Pelaksanaan Terbatas Aplikasi SAKTI*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Perubahan Pelaksanaan Piloting SAKTI*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Pelaksanaan Piloting Aplikasi SAKTI*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI*.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sedarmayanti. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S. P. (2008). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Steers, M. R. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Takahepis, J. K., Kasenda, V., & Monintja, D. K. (2021). *Efektivitas pelayanan akta kelahiran secara online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.

Wibowo. (2007). Manajemen Kinerja.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wirawan. (2009). Evaluasi Kinerja
Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi,
dan Penelitian. Jakarta: Salemba Empat.

Zwell, M. (2000). Creating a Culture of
Competence. John Wiley & Sons.